



LAPORAN TAHUNAN BAPPENDA TAHUN 2016



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Majapahit No.17 Telp. 0370-631502 - 631724, Fax. 0370-641151 Mataram (83117)
e-Mail: dispenda@ntbprov.go.id, www.dispenda.ntbprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat, karunia dan perkenanNya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan 2016 edisi terbit 2017. Laporan ini merupakan rangkuman dan rekaman hasil kegiatan pelaksanaan program kerja yang dipertanggungjawabkan kepada publik, baik pendapatan maupun belanja selama kurun waktu satu tahun dimulai dari awal Januari sampai dengan akhir Desember 2016, sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA, yang dibuat dengan maksud untuk dapat memberikan informasi mengenai kegiatan dan hasil-hasil yang dimanifestasikan dengan capaian target kinerja yang telah dicapai Bappenda, dan dapat menjadi masukan kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka penyusunan kebijakan pendapatan daerah dimasa yang akan datang.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui berbagai ikhtiar dan inovasi serta terobosan yang dilaksanakan selama tahun 2016 telah mendorong ditingkatkannya kualitas fungsi dukungan pelayanan aparatur secara umum, disamping telah dilakukan berbagai upaya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi pengelolaan pendapatan daerah, dan mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan yang berprinsip pada tata pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*).

Akhir kata, semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga pihak-pihak berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, April 2017

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. H. ISWANDI M.Si

NIP. 19651231 199403 1 153

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Data Umum Organisasi	1
1.2. Struktur Organisasi dan Personalia	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penyusunan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Visi dan Misi	9
2.2. Tujuan dan Sasaran	10
2.3. Nilai-Nilai Organisasi	10
2.4. TGB Spirit	11
BAB III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PENDAPATAN DAN BELANJA..	12
3.1. Pendapatan	12
3.2. Belanja	31
BAB IV PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH	48
4.1. Permasalahan	48
4.2. Upaya Pemecahan Masalah	48
BAB V PENUTUP	50
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran	51

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Data Target dan Realisasi Pajak dan denda Pajak 2016	12
Tabel 3.2	Data Target dan Realisasi PKB Tahun 2016	14
Tabel 3.3	Data Target dan Realisasi BBNKB Tahun 2016	16
Tabel 3.4	Data Target dan Realisasi Denda Pajak Tahun 2016	16
Tabel 3.5	Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016	17
Tabel 3.6	Pertumbuhan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015 - 2016	19
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2018	20
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 Dengan Proyeksi RPJMD Tahun 2016	22
Tabel 3.9	Rasio Efisiensi Anggaran Pendapatan	23
Tabel 3.10	Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah	26
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran UPTD PPDRD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB	31
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB Per-Program Kegiatan	32
Tabel 3.13	Capaian Program	45
Tabel 3.14	Jumlah Nilai Capaian	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DATA UMUM ORGANISASI

Dinas Pendapatan daerah (Dipenda) Provinsi NTB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dipenda adalah salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi NTB yang mempunyai peran dan fungsi yang strategis dan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran tersebut terletak pada tugas yang diemban untuk melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah sesuai kewenangan yang ada dengan prinsip transparan, akuntabel dan berbasis kinerja.

Pada Konteks yang lebih luas, Dipenda berperan sebagai organisasi perangkat daerah/kelembagaan daerah yang melaksanakan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan berbagai ikhtiar dalam upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dengan seluruh sumber daya yang dimiliki. Pada sisi lain secara kelembagaan, pembentukan Dipenda Provinsi NTB sebagai lembaga teknis daerah dihatatkan untuk memperkuat organisasi dalam kedudukan Protokoler Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah di Provinsi NTB.

Selain mengkoordinir Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dipenda Provinsi NTB juga melakukan tugas pokok pemungutan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air

Permukaan, sedangkan untuk Pajak Rokok yang juga sebagai salah satu obyek yang kewenangan pemungutannya telah diberikan kepada daerah, akan dilakukan sejalan dengan amanat Undang-Undang ini yang telah menetapkan tanggal mulai berlakunya pada 1 Januari 2014.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya PKB dan BBNKB, Dinas Pendapatan Daerah menggunakan SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Tujuan dibentuknya Samsat ini adalah memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak karena pada awalnya masing-masing instansi terpisah sehingga menyulitkan wajib pajak ketika membayar pajak kendaraan. Dalam hal ini Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Kantor Bersama Samsat tersedia disemua Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB di 9 Kabupaten/Kota. Dalam pelayanan pengesahan / Daftar Ulang Pajak Kendaraan bermotor, selain dapat dibayarkan melalui kantor bersama samsat yang ada di UPTD-UPTD tersebut, dapat pula dibayarkan melalui pelayanan samsat pembantu lainnya yang disediakan DIPENDA Provinsi NTB. Sampai dengan tahun 2016 jumlah samsat yang ada di Provinsi NTB sebanyak 37 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kota Mataram

- Samsat Mataram
- Samsat Keliling (2 unit)
- Drive Thru Mataram
- Drive Thru Mandalika
- Samsat Week End
- Samsat Corner Lombok Epicentrum Mall

2. Kab. Lombok Barat
 - Samsat Gerung
 - Samsat Keliling
 - Drive Thru Narmada
 - Drive Thru Kediri
 - Drive Thru Gunung Sari
3. Kab. Lombok Tengah
 - Samsat Praya
 - Samsat Keliling
 - Drive Thru Kopang
 - Drive Thru Praya
4. Kab. Lombok Utara
 - Samsat Tanjung
 - Samsat Keliling
5. Kab. Lombok Timur
 - Samsat Selong
 - Samsat Keliling
 - Drive Thru Aikmel
 - Drive Thru Sepapan
 - Drive Thru Paok Motong
6. Kab. Sumbawa Barat
 - Samsat Taliwang
 - Samsat Keliling
7. Kab. Sumbawa
 - Samsat Sumbawa Besar
 - Samsat Keliling
 - Drive Thru Sliper Ate
 - Gerai Alas
 - Gerai Pelampang
8. Kab. Dompu
 - Samsat Dompu
 - Samsat Keliling

9. Kab/Kota Bima

- Samsat Raba Bima
- Samsat Keliling Raba Bima
- Samsat Panda
- Drive Thru Sape
- Samsat Keliling Panda Bima

Kedepannya jumlah pelayanan Samsat akan semakin ditingkatkan khususnya di daerah yang memiliki potensi pajak yang besar demi meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, Dipenda Provinsi NTB dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam menunaikan seluruh tugas dan fungsinya.

Pelayanan yang terbaik yang dihasilkan dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Dipenda Provinsi NTB, akan dapat dilihat dan dianalisis dari Laporan Tahunan yang memuat tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dipenda Provinsi NTB selama satu tahun untuk melihat perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu serta berbagai permasalahan yang dihadapi guna dapat diselesaikan pada tahun-tahun mendatang. Input data yang disajikan dalam laporan ini bersumber dari Sekretariat dan seluruh bidang serta UPTD PPDRD yang ada di Dipenda Provinsi NTB, sehingga laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja seluruh unit yang ada.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB No 7 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur NTB no. 12 Tahun 2008 terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
 - Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Bagian Program dan Pelaporan

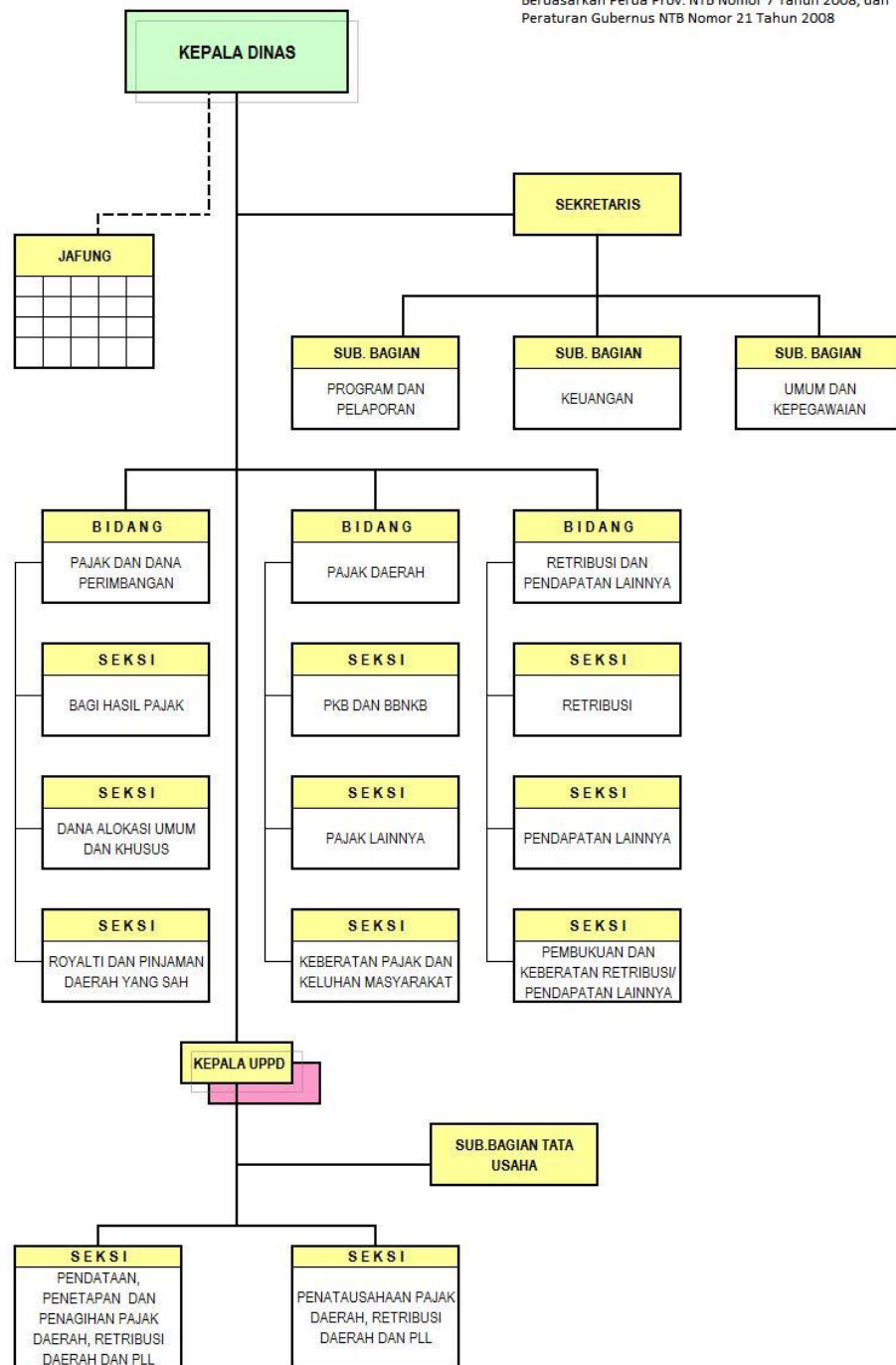
- Bagian Keuangan dan Aset
- 3) Bidang Pajak dan Dana Perimbangan
 - Seksi Bagi Hasil Pajak
 - Seksi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
 - Seksi Royalti dan Pinjaman Daerah yang sah
 - 4) Bidang Pajak Daerah
 - Seksi PKB dan BBNKB
 - Seksi Pajak Lainnya
 - Seksi Keberatan Pajak dan Keluhan Masyarakat
 - 5) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya
 - Seksi Retribusi
 - Seksi Pendapatan Lainnya
 - Seksi Pembukuan dan Keberatan Retribusi dan Pendapatan Lainnya
 - 6) Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UPTD PPDRD) yaitu :
 - a) UPTD PPDRD Mataram
 - b) UPTD PPDRD Gerung
 - c) UPTD PPDRD Praya
 - d) UPTD PPDRD Tanjung
 - e) UPTD PPDRD Selong
 - f) UPTD PPDRD Taliwang
 - g) UPTD PPDRD Sumbawa Besar
 - h) UPTD PPDRD Dompu
 - i) UPTD PPDRD Bima

masing-masing UPTD PPDRD terdiri dari subbag TU, seksi pendataan, penetapan dan penagihan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta seksi penatausahaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Struktur Dipenda Provinsi NTB tahun 2016 dapat dilihat dari bagan berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Berdasarkan Perda Prov. NTB Nomor 7 Tahun 2008; dan
Peraturan Gubernur NTB Nomor 21 Tahun 2008



B. Personalia Dipenda

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 didukung oleh personil sebanyak 323 PNS, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kantor Induk sebanyak 90 personil
- b) UPTD PPDRD Mataram 43 personil
- c) UPTD PPDRD Gerung 32 personil
- d) UPTD PPDRD Praya 33 personil
- e) UPTD PPDRD Tanjung 19 personil
- f) UPTD PPDRD Selong 30 personil
- g) UPTD PPDRD Taliwang 14 personil
- h) UPTD PPDRD Sumbawa Besar 26 personil
- i) UPTD PPDRD Dompu 15 personil
- j) UPTD PPDRD Bima 21 personil

Jumlah tersebut masih dirasakan kurang untuk melaksanakan semua kegiatan pokok Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama pada UPTD PPDRD di pulau Sumbawa.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB selama tahun anggaran 2016.

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

1.4. Sistematika Penyusunan

Laporan Tahunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA DIPENDA Tahun 2016 yang berpedoman pada Peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 11 tahun 2015 tentang APBD Tahun 2016 jo Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Di samping itu jenis program dan kegiatan yang digunakan juga mengacu pada Renstra tahun 2013 – 2018.

Adapun Sistematika Laporan Tahunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Dipenda, Struktur Organisasi dan Personalia, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran, Nilai-nilai Organisasi serta TGB Spirit.

BAB III : CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

Pada bab ini menjelaskan Capaian Kinerja baik dari sisi Belanja maupun Pendapatan, terkait tugas selaku Koordinator penghimpun pendapatan daerah.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

A. Visi

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu: **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN DAN BERDAYA SAING"** (NTB Bersaing)", Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Visi yaitu:

"Menjadi Koordinator Pendapatan dan Penghimpun Pajak Daerah Yang Proporsional, Berkesinambungan dan Akuntabel"

Visi ini memberikan gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai masyarakat NTB dan Pemerintahan Daerah melalui kebijakan Umum peningkatan Pendapatan Daerah yaitu :

- a. Memantapkan pengelolaan keuangan Daerah
- b. Mendorong penerapan sistem pelayanan satu pintu/satu atap
- c. Mendorong peningkatan pengembangan kompetensi bagi aparatur pengelola pendapatan.

B. Misi

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dijabarkan dalam Visi tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merumuskan dan menetapkan Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kemampuan sumber pendanaan daerah yang proporsional dan berkesinambungan.
- b. Mewujudkan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang akuntabel.

2.2 Tujuan Dan Sasaran

Dengan mengacu pada visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, dirumuskan tujuan, sasaran dan kebijakan sebagai berikut:

A. Tujuan

Sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam RPJMD maka ditetapkan tujuan yang dirangkum menjadi :

- 1). Meningkatkan sumber pendanaan daerah
- 2). Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah

B. Sasaran

Dengan mengacu kepada RPJMD lebih lanjut ditetapkan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- 1). Tersedianya data dan informasi potensi PAD yang akurat.
- 2). Tersedianya sistem pelayanan PAD.
- 3). Tersedianya dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya.
- 4). Terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik.

2.3 Nilai-Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi menjelaskan bagaimana seharusnya bersikap dalam menjalankan tugas mencapai visi dan misi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bappenda Provinsi NTB telah merumuskan nilai-nilai organisasi, yang merupakan akronim dari IHSAN, yang diharap mampu menjadi daya ungkit dalam mempinga-ruhi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi tersebut diatas dengan rumusan sebagai berikut: **I**ntegritas [Bekerja dengan penuh integritas, selalu menjaga dan memelihara nama baik pribadi dan organisasi; **H**armonis [Membangun suasana kerja yang harmonis menjadi satu tim kerja yang solid dengan saling menasehati; **S**inergi [Mewujudkan sinergi sebagai budaya kerjasama antar individu dan berbagai pihak yang terkait untuk mencapai hasil yang lebih besar; **A**manah [Menunaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh amanah yang dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat; dan **N**iat

[Seluruh aktivitas dan perkhidmatan dalam tugas selalu dibarengi dengan niat sebagai amal ibadah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan].

2.4 TGB Spirit

Percepatan pembangunan diperlukan agar NTB bias berlari lebih cepat mengejar ketertinggalan. Percepatan pembangunan dinisbatkan untuk meningkatkan marwah atau kehormatan kolektif masyarakat NTB di pentas pergaulan nasional. Untuk itulah visi NTB Bersaing harus menjadi barometer seluruh perangkat daerah dan masyarakat, yang menginspirasi bergemanya TGB Spirit sebagai persembahan terbaik untuk NTB, yakni: Kerja keras; Kesungguhan; Komitmen; Kebersamaan; dan Keberpihakan kepada rakyat.

BAB III

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 PENDAPATAN

3.1.1 CAPAIAN ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2016

Sesuai pasal 5 UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dalam APBD provinsi NTB tahun 2016, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan pendapatan daerah sebesar Rp. 3.802.933.445.799,00 dan terealisasi sebesar 103,87 persen atau sebesar Rp. 3.949.995.110.733,97 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1

Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016

Kelompok & Jenis Pendapatan Daerah		Target 2016 (Rp.)	Realisasi* 2016 (Rp.)	Capaian Pendapatan
1		2	3	4
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		3.802.933.445.799,00	3.949.995.110.733,97	103,87
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.450.044.930.319,00	1.359.842.331.828,97	93,78
	a) Pajak Daerah	1.037.549.599.000,00	1.003.260.953.668,00	96,70
	b) Retribusi Daerah	29.890.858.000,00	29.791.594.549,00	99,67
	c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	157.964.885.190,00	72.827.611.744,00	46,10
	d) Lain-lain PAD yang Sah	224.639.588.129,00	253.962.171.867,97	113,05
2	DANA PERIMBANGAN	2.333.604.004.580,00	2.583.032.589.905,00	110,69
	a) Bagi Hasil Pajak	247.954.406.000,00	375.036.424.549,00	151,25
	b) Dana Alokasi Umum	955.792.513.580,00	1.117.691.709.000,00	116,94
	c) Dana Alokasi Khusus	1.129.857.085.000,00	1.090.304.456.356,00	96,50
3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.284.510.900	7.120.189.000	36,92
Jumlah (1+2+3) = (Realisasi : Target x 100%)		3.802.933.445.799,00	3.949.995.110.733,97	103,87

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 (diolah)

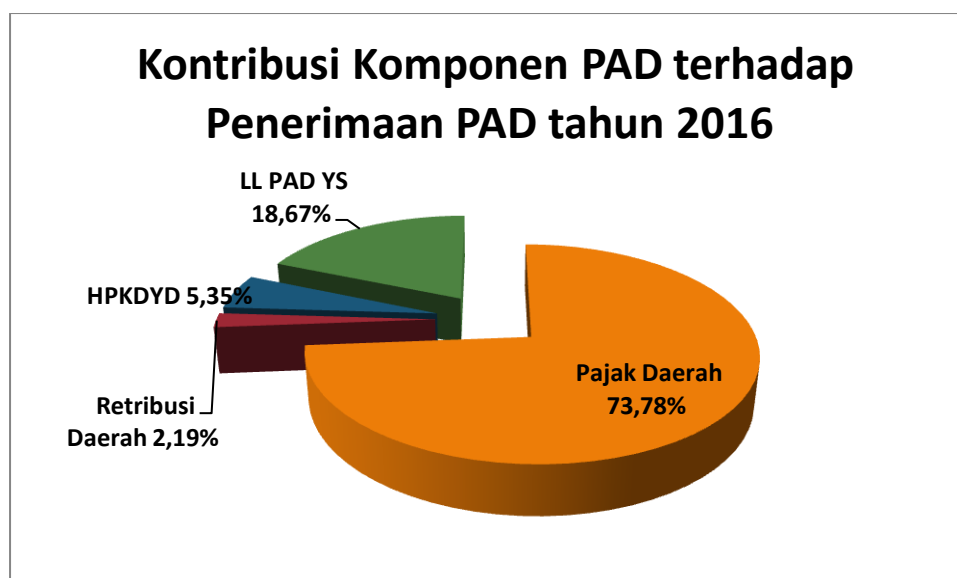
*LRA per tanggal 17 Maret 2017

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Tahun 2016 realisasi PAD sebesar Rp. 1.359.842.331.828,97 atau 93,78% dari target PAD sebesar Rp.1.450.044.930.319,00. PAD memberikan kontribusi sebesar 34,43% terhadap pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Adapun kontribusi penerimaan masing-masing komponen tersebut terhadap penerimaan PAD tahun 2016 tersaji sebagai berikut :



Secara rinci, penerimaan komponen PAD tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan (PAP).

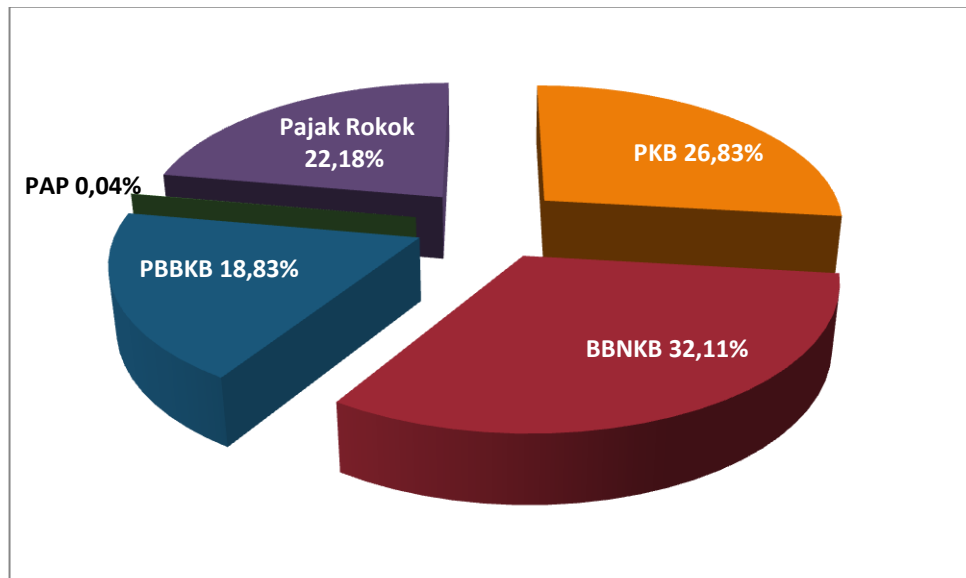
Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD yaitu sebesar 73,78%. Pada tahun 2016 pajak daerah telah terealisasi sebesar Rp. Rp.1.003.260.953.668,00 atau 96,67% dari target tahun 2016 sebesar Rp. 1.037.549.599.000,00. Rincian penerimaan pajak daerah selama tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016

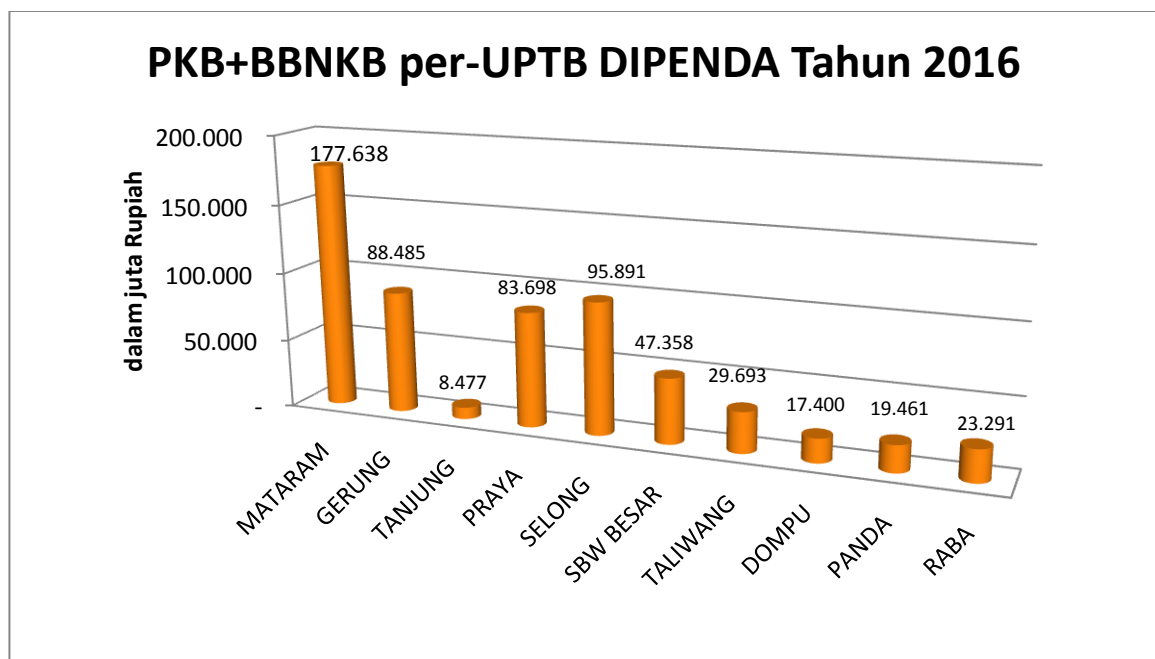
NO	Komponen Pajak Daerah	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	PKB	248.153.000.000	269.187.973.631	108,48
2.	BBNKB	318.503.155.000	322.208.887.701	101,16
3.	PBBKB	192.900.000.000	188.945.861.622	97,95
4.	PAP	300.000.000	361.290.857	120,43
5.	Pajak Rokok	277.693.444.000	222.556.939.857	80,14
Pajak Daerah		1.037.549.599.000	1.003.260.953.668	96,70

Sumber data : Bidang Pajak Daerah Dipenda Provinsi NTB tahun 2016 (diolah)

Kontribusi masing-masing bagian pajak daerah diatas adalah sebagai berikut:



PKB dan BBNKB merupakan sumber penerimaan pajak daerah yang terbesar dengan kontribusi sebesar 58,95% dari keseluruhan penerimaan pajak daerah. PKB dan BBNKB dipungut langsung oleh 9 UPTD PPDRD Dipenda Provinsi NTB melalui 37 lokasi pelayanan samsat yang menyebar diwilayah NTB. Adapun penerimaan PKB dan BBNKB dari masing-masing UPTD Dipenda Provinsi NTB dalam grafik adalah sebagai berikut:



Data anggaran/target dan realisasi pendapatan masing-masing bagian PKB dan BBNKB yang diterima 9 UPTD tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.3

Data Target dan Realisasi PKB Tahun 2016 per UPTD PPDRD

UPTD PPDRD	Target 2016 (Rp.)	Realisasi 2016 (Rp.)	%
1 Mataram	86.036.572.000	88.888.793.805	103,32
2 Gerung	28.423.220.000	30.126.889.110	105,99
3 Tanjung	6.651.423.000	8.477.225.617	127,45
4 Praya	33.246.442.000	37.055.803.776	111,46
5 Selong	36.492.414.000	40.134.619.809	109,98
6 Sumbawa Besar	19.330.379.000	21.077.352.133	109,04
7 Taliwang	13.063.598.000	15.637.707.858	119,70
8 Dompu	7.135.313.000	7.530.942.967	105,54
9 Kab&kota Bima	17.773.639.000	20.258.642.466	113,98
Jumlah	248.153.000.000	269.187.973.631	108,48

Sumber Data : Bidang Pajak Daerah Dipenda Provinsi NTB tahun 2016 (diolah)

Dari data tabel 3.3 diatas, Jika dilihat dari target penerimaan PKB masing-masing UPTD, maka capaian terbesar untuk PKB diperoleh UPTD PPDRD Tanjung dengan capaian realisasi sebesar 127,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.6.651.432.000,- dan capaian realisasi terkecil diperoleh UPTD PPDRD Mataram dengan capaian realisasi sebesar 103,32% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.86.036.572.000,-. Walaupun capaian realisasi UPTD PPDRD Mataram merupakan yang terkecil dibandingkan dengan capaian realisasi UPTD yang lain, tetapi Penerimaan PKB UPTB PPDRD Mataram merupakan yang terbesar yaitu Rp.88.888.793.805,- dan yang terkecil diterima oleh UPTD PPDRD Dompu sebesar Rp.7.530.942.967,-

Tabel 3.4

Data Target dan Realisasi BBNKB tahun 2016

UPTD PPDRD	Target 2016 (Rp.)	Realisasi 2016 (Rp.)	%
1 Mataram	88.217.042.000	88.750.043.334	100,60
2 Gerung	44.806.080.000	58.359.055.747	130,25
3 Tanjung	13.188.012.000	-	0,00
4 Praya	46.143.610.000	46.642.700.157	101,08
5 Selong	55.404.156.000	55.757.219.048	100,64
6 Sumbawa Besar	24.530.826.000	26.280.750.366	107,13

UPTD PPDRD	Target 2016 (Rp.)	Realisasi 2016 (Rp.)	%
7 Taliwang	13.229.500.000	14.055.787.009	106,25
8 Dompu	11.200.800.000	9.869.342.560	88,11
9 Kab&kota Bima	21.783.129.000	22.493.989.480	103,26
Jumlah	318.503.155.000	322.208.887.701	101,16

Sumber Data : Bidang Pajak Daerah Dipenda Provinsi NTB tahun 2016 (diolah)

BBNKB merupakan bagian pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar yaitu 33,11% terhadap pajak daerah. Tahun 2016, Realisasi penerimaan BBNKB terbesar diterima oleh UPTD PPDRD Mataram sebesar Rp. 88.750.043.334 dan yang belum ada penerimaan BBNKB-nya adalah UPTD PPDRD Tanjung. Jika dilihat dari target penerimaan BBNKB masing-masing UPTD, maka capaian terbesar untuk BBNKB tahun 2016 diperoleh UPTD PPDRD Gerung sebesar 130,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 44.806.080.00,-.

Selama tahun 2016 telah tercatat jumlah kendaraan bermotor sebagai potensi PKB dan BBNKB di provinsi NTB sebagai berikut:

Tabel 3.5
Data Objek Ranmor Pada UPTD PPDRD 2016

No	UPTD PPDRD	BARU	DU	FAD	POTENSI AKTIF	KTMDU	JUMLAH RANMOR
		OBY	OBY	OBY	OBY	OBY	OBY
1	2	3	4	5	6	7	8 = $\sum 6+7$
1	Mataram	20.775	126.082	224	147.081	95.746	242.827
2	Gerung	21.163	78.264	752	100.179	92.182	192.361
3	Tanjung	5.448	24.343	6	29.797	20.232	50.029
4	Praya	16.962	97.494	640	115.096	95.410	210.506
5	Selong	22.999	122.748	1.067	146.814	70.915	217.729
6	Sumbawa Besar	8.855	57.334	270	66.459	53.006	119.465
7	Taliwang	3.294	23.627	35	26.956	16.328	43.284
8	Dompu	3.096	17.576	299	20.971	20.513	41.484
9	Panda Bima	4.410	23.459	70	27.939	32.892	60.831
10	Raba Bima	3.318	21.043	37	24.398	31.142	55.540
Jumlah		110.320	591.970	3.400	705.690	528.366	1.234.056

Sumber Data : Bidang Pajak Daerah Dipenda Provinsi NTB tahun 2016

Dari jumlah kendaraan bermotor yang terdata sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar 1.234.056 unit, 42 persennya tidak melakukan daftar ulang. Angka TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang)

terbesar berada pada Kota Mataram dan angka TMDU terendah berada pada Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan potensi aktif terbesar berada pada Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur.

Bagian Pajak Daerah lainnya adalah PBBKB, PAP, dan Pajak rokok. Dari target masing-masing komponen pajak daerah tersebut, yang tidak melampaui target 2016 adalah bagian PBBKB dan Pajak Rokok, hal ini disebabkan kebijakan pemerintah pusat yang selama tahun 2016 telah menurunkan harga bahan bakar minyak sebanyak 2 kali. Begitupun dengan pajak rokok yang tidak melampaui target dikarenakan adanya penundaan transfer hasil pajak rokok triwulan IV karena keterlambatan penerimaan laporan bagi hasil pajak ke Kab/Kota pada triwulan sebelumnya (triwulan III).

Penerimaan dari bagian PBBKB adalah sebesar Rp.322.208.887.701 atau 101,16% dari target PBBKB tahun 2016. PBBKB ini berupa pajak BBM (premium, solar dan pertamax) dari 3 Wajib Pajak yaitu Pertamina Mor V Surabaya, PT. Elnusa Petrefin Jaksel dan PT. Pertamina Patra Niaga Surabaya.

Untuk Pajak Air Permukaan (PAP), realisasinya sebesar Rp.361.290.857,- atau 120,43% dari target PAP tahun 2016. Penerimaan PAP bersumber dari pajak yang disetorkan 16 wajib pajak yang ada di wilayah provinsi NTB.

Bagian pajak daerah yang terakhir adalah pajak rokok. Sesuai UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Secara teknis, kementerian keuangan akan mentransfer dana pajak rokok pertriwulan setelah menerima laporan bagi hasil pajak rokok ke Kab/Kota untuk triwulan sebelumnya.

Hasil penerimaan pajak daerah sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi NTB dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan ke Kab/Kota sebanyak 30%.
- Hasil penerimaan PBBKB & Pajak Rokok diserahkan ke Kab/Kota sebanyak 70%
- Hasil Penerimaan PAP diserahkan ke Kab/Kota sebanyak 50%.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa obyek retribusi terdiri atas :

- 1). Retribusi Jasa Umum
- 2). Retribusi Jasa Usaha
- 3). Retribusi Perijinan tertentu

Realisasi Retribusi daerah tahun 2016 sebesar Rp.29.791.594.549 mencapai 99,67% dari target sebesar Rp. 29.890.858.000,00. Retribusi daerah, memberikan kontribusi terkecil bagi PAD yaitu 2,19%. Rincian penerimaan retribusi daerah tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2016

NO	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	%
I.	RETRIBUSI DAERAH	29,890,858,000.00	29,791,594,549.00	99.67
1	Retribusi Jasa Umum	19,059,250,000.00	19,214,094,092.00	100.81
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	18,800,000,000.00	18,927,227,342.00	100.68
b.	Retribusi Tera / Tera Ulang	240,000,000.00	286,866,750.00	119.53
c.	Retribusi Biaya Cetak Peta	19,250,000.00	-	-
2	Retribusi Jasa Usaha	9,182,718,500.00	8,816,358,857.00	96.01
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4,557,206,500.00	3,676,781,427.00	80.68
b.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa dan Asrama	2,512,125,000.00	2,733,928,400.00	108.83
c.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2,113,387,000.00	2,405,649,030.00	113.83

NO	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	%
3	Retribusi Perijinan Tertentu	1,648,889,500.00	1,761,141,600.00	106.81
a.	Retribusi Ijin Trayek	193,889,500.00	107,600,000.00	55.50
b.	Retribusi Usaha Perikanan	-	30,964,000.00	-
c.	Retribusi Perpanjangan IMTA	1,455,000,000.00	1,622,577,600.00	111.52

Sumber data : Laporan Tahunan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya TA 2016, diolah

Penerimaan retribusi daerah yang terbesar adalah dari komponen retribusi jasa umum yaitu sebesar 64% dari keseluruhan retribusi daerah. Dari tabel 3.6 diatas, dapat dilihat jenis retribusi daerah yang tidak melampaui target adalah retribusi jasa usaha dengan capaian penerimaan sebesar 96,01% dari target tahun 2016. Hal ini disebabkan target komponen retribusi jasa usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah yang belum bisa dicapai secara optimal karena fasilitas objek retribusi tersebut yang kurang memadai dan kalah saing dengan fasilitas serupa yang ditawarkan oleh pihak swasta.

Retribusi daerah adalah jenis komponen PAD yang sepenuhnya dikelola oleh SKPD/UPTD pemerintah provinsi NTB. Adapun SKPD/UPTD penerima hasil retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
SKPD/UPTD Penerima Retribusi Daerah Tahun 2016

NO	Jenis Retribusi Daerah		SKPD/UPTD Pengelola
1.	Retribusi Jasa Umum		
	a.	Ret. Pelayanan Kesehatan	- BKMM - Balabkes Pulau Lombok - Balabkes Pulau Sumbawa - RS Manambai H. Abd Kadir
	b.	Ret. Penggantian Biaya Cetak	- Dinas Kimpraswil
	c.	Ret. Tera Ulang	- Disperindag
2.	Retribusi Jasa Usaha		
	a.	Ret. Pemakaian kekayaan Daerah	- Dikpora (aula BPKBM) - Bapelkes - Dinas PU (alat berat & Lab) - Dinsosdukcapil - Dinas Koperasi & UKM - Dikbudpar

NO	Jenis Retribusi Daerah		SKPD/UPTD Pengelola
			- Biro Umum - BKD & Diklat - Disnakeswan - Dislutkan
	b.	Ret. Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	- Dikpora - Bapelkes - Disnakertrans - Dinas Koperasi & UKM - Kantor Penghubung - BKD & Diklat - Bakorluh
	c.	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	- Dinas Pertanian - Dinas Perkebunan - Disnakeswan - Dislutkan
3.	Retribusi Perizinan Tertentu		
	a.	Ret. Izin Trayek	- Dinas Perhubungan
	b.	Ret. Izin Usaha Perikanan	- Dislutkan
	c.	Ret. IMTA	- Disnakertrans

Sumber Data : Laporan Tahunan Retribusi dan Pendapatan Lainnya tahun 2016 (diolah)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyertaan modal pada perusahaan daerah dengan rincian target dan realisasi penerimaan selama tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun 2016

NO	Perusahaan Daerah	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	PT. Bank NTB	59,958,450,102.00	59.958.510.102	100,00
2.	PD. BPR NTB	11,374,571,865.00	11.631.764.969	102,26
3.	PT. Gerbang Mas NTB	1,000,000,000.00	1.000.000.000	100,00
4.	PT. Daerah Mandiri Bersaing (DMB)	85,406,400,000.00	-	-
5.	PT. Asuransi Bangun Askrida	88,761,211.00	136.702.012	100,00
6.	PT. Jam Krida	136,702,012.00	100.634.661	113,38
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		157.964.885.190	72.827.611.744	46,10

Sumber Data : Laporan Tahunan Retribusi dan Pendapatan lainnya Tahun 2016 (diolah)

Pada Tahun 2016 realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah hanya Rp. 72.827.611.744,00 atau 46,10 persen dari targetnya yang sebesar Rp. 157.964.885.190,00 dan memberikan kontribusi sebesar 5,35 persen terhadap PAD. Rendahnya capaian dari komponen PAD ini dikarenakan belum diterimanya deviden dari PT. Daerah Maju Bersaing.

4. Lain-Lain PAD yang Sah

Pendapatan ini bersumber dari penerimaan-penerimaan diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah telah memberikan kontribusi sebesar 18,67 persen untuk realisasi PAD tahun 2016 dengan realisasi LL PAD yang sah sebesar Rp. 253.962.171.867,97. Realisasi tersebut mencapai 113,05 persen dari target Lain-Lain PAD yang sah tahun 2016.

Penerimaan dari komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah didasari dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Lain-lain PAD Yang Sah. Adapun sumber penerimaan dari Lain-lain PAD Yang Sah adalah sebagai berikut :

- a) Hasil Penjualan Aset yg tidak Dipisahkan
- b) Jasa Giro
- c) Bunga Deposito
- d) Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
- e) Denda Pajak
- f) Denda Retribusi
- g) Pendapatan dari Pengembalian
- h) Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan
- i) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
- j) Pendapatan BLUD
- k) Lain-lain PAD yang sah lainnya.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dipenda Provinsi NTB tahun 2016, selain pajak daerah, sumber PAD lainnya yang dianggarkan adalah denda pajak. Denda pajak ini berupa denda PKB dan denda BBNKB yang pemungutannya bersamaan dengan PKB dan BBNKB. Penerimaan denda PKB dan BBNKB selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9**Data Target dan Realisasi Denda Pajak Daerah Tahun 2016**

UPTD PPDRD	Target 2016 (Rp.)	Realisasi 2016 (Rp.)	%	Objek Pajak* (unit)
Denda PKB				
1 Mataram	4,716,455,000	5,900,994,481	125.12	56.385
2 Praya	2,964,362,600	2,780,920,166	93.81	22.722
3 Selong	3,004,283,600	3,089,663,486	102.84	46.626
4 Sumbawa Besar	1,675,274,300	1,616,126,494	96.47	20.558
5 Bima	1,504,520,800	1,691,434,129	112.42	20.400
6 Dompu	889,072,600	602,053,236	67.72	22.244
7 Gerung	2,165,224,400	1,924,735,337	88.89	85.604
8 Taliwang	887,059,700	1,005,251,893	113.32	9.094
9 Tanjung	642,307,000	657,351,848	102.34	xxxxx
Jumlah	18.448.560.000	19.268.531.170	104,44	
Denda BBNKB				
1 Mataram	30,210,600	126,307,796	418.09	515
2 Praya	8,500,800	48,957,177	575.91	87
3 Selong	13,744,600	41,943,963	305.17	447
4 Sumbawa Besar	9,177,500	20,483,190	223.19	94
5 Bima	7,975,800	44,694,173	560.37	166
6 Dompu	2,272,800	6,311,971	277.72	23
7 Gerung	10,080,000	35,215,672	349.36	5.016
8 Taliwang	17,456,900	41,615,371	238.39	44
9 Tanjung	581,000	-	-	-
Jumlah	100.000.000	365.529.313	365,53	6.392

Sumber Data : Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya Dipenda Provinsi NTB tahun 2016 dan
 *Laporan Bulanan UPTB bulan Desember 2016 (diolah)

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Realisasi Dana Perimbangan tahun 2016 sebesar Rp. 2.583.032.589.905,00 telah melampaui target sebesar 110,69% dan merupakan sumber pendapatan daerah terbesar dengan kontribusinya bagi pendapatan daerah tahun 2016 sebesar 65,39% (tabel 3.1).

Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan:

1. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka prosentase sesuai kriteria yang ditetapkan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada TA. 2016 direncanakan

sebesar Rp.247.954.406.000 dengan realisasi sebesar Rp. 375.036.424.549 atau 151,25%.

2. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada TA. 2016 direncanakan sebesar Rp.955.792.513.580 dengan realisasi sebesar Rp. 1.117.691.709.000 atau 116,94%.
3. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada TA. 2016 direncanakan sebesar Rp.1.129.857.085.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.090.304.456.356 atau 96,50%.

C. Lain-lain Pendapatan yang sah

Realisasi Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2016 mencapai 36,92 persen yaitu sebesar Rp. 7.120.189.000,00 dari target Rp. 19.284.510.900,00. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini memberikan kontribusi terkecil terhadap pendapatan daerah tahun 2016 yaitu 0,18 persen. Penerimaan dari komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari :

1. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, penerimaan ini berasal dari :
 - Sumbangan Pihak Ketiga pada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi.
 - Kontribusi PT. Jasa Raharja dan Dealer pada Dinas Pendapatan
 - Jasa Pengiriman dan pelayanan TKI pada Dinas Tenaga Kerja
 - Jasa Pelayanan Koperasi dan Dana Pembangunan Daerah Kerja pada Dinas Koperasi dan UKM.
2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, bersumber dari :
 - BOS Satuan Pendidikan Dasar dan Dana Insentif Daerah

3.1.2 CAPAIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2016 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA BAPPENDA PROVINSI NTB TAHUN 2013-2018.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB adalah pertumbuhan PAD, dimana proyeksi tahunan PAD yang menjadi acuan APBD tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 dan Renstra Dipenda Provinsi NTB tahun 2013-2018. Pertumbuhan PAD terhadap target dalam APBD Provinsi NTB dan target akhir RPJMD/Renstra (yaitu target tahun 2018) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Realisasi Pendapatan Tahun 2016

NO	Uraian	TARGET TAHUN 2016 (Rp.)	REALISASI (Rp.)			CAPAIAN TAHUN 2016 TERHADAP				Target Tahun 2018 (Target Akhir RPJMD/Renstra)
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Target Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7=6:4x100-100	8=6:5x100-100	9=6:3x100	10=6:11x100	11
I	PAD	1.450.044.930.319,00	1.116.743.519.598,45	1.372.108.887.856,75	1.359.842.331.828,97	21,77	-0,89	93,78	85,51	1.590.322.845.658,00
A.	Pajak Daerah	1.037.549.599.000,00	904.782.698.514,00	1.010.655.242.476,00	1.003.260.953.668,00	10,88	-0,73	96,70		
	PKB	248.153.000.000,00	217.999.713.843,00	240.153.372.762,00	269.187.973.631,00	23,48	12,09	108,48		
	BBNKB	318.503.155.000,00	339.627.427.424,00	318.503.154.404,00	322.208.887.701,00	-5,13	1,16	101,16		
	PBBKB	192.900.000.000,00	209.841.374.309,00	227.320.003.266,00	188.945.861.622,00	-9,96	-16,88	97,95		
	PAP	300.000.000,00	271.376.899,00	297.512.060,00	361.290.857,00	33,13	21,44	120,43		
	Pajak Rokok	277.693.444.000,00	137.042.806.039,00	224.381.199.984,00	222.556.939.857,00	62,40	-0,81	80,14		
B.	Retribusi Daerah	29.890.858.000,00	19.838.517.587,00	24.357.011.304,86	29.791.594.549,00	50,17	22,31	99,67		
C.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	157.964.885.190,00	57.353.289.032,00	63.229.181.808,00	72.827.611.744,00	26,98	15,18	46,10		
D.	Lain-Lain PAD Yang Sah	224.639.588.129,00	134.769.014.465,45	273.867.452.267,89	253.962.171.867,97	88,44	-7,27	113,05		
II	DANA PERIMBANGAN	2.333.604.004.580,00	1.212.086.447.141,00	1.450.695.264.778,00	2.583.032.589.905,00	113,11	78,05	110,69	69,47	3.718.354.340.828,00
III	LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	19.284.510.900	478.464.643.742,20	625.310.001.000,00	7.120.189.000,00	-98,51	-98,86	36,92	36,92	19.284.510.900,00
Total Pendapatan Daerah		3.802.933.445.799,00	2.807.294.610.481,65	3.448.114.153.634,75	3.949.995.110.733,97	40,70	14,56	103,87	74,14	5.327.961.697.386,00

Sumber data : Data Perkembangan Realisasi Pendapatan dan RPJMD/Renstra 2013-2018 (edisi revisi)

Pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2016 secara keseluruhan meningkat sebesar 14,56 persen dari realisasi pendapatan daerah tahun 2015. Rincian perkembangan pendapatan daerah provinsi NTB sebagai berikut:

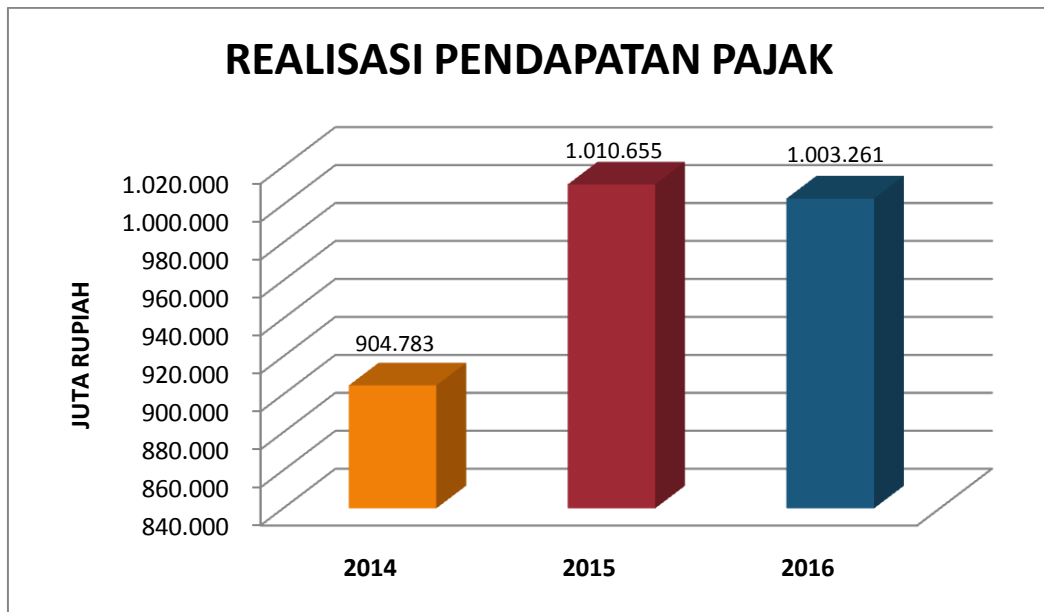
A. Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan PAD tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015 yaitu sebesar -0,89. Angka pertumbuhan yang menurun ini dapat dilihat dari beberapa komponen PAD yang realisasinya menurun dari tahun sebelumnya (yaitu tahun 2015). Dari kolom 8 pada tabel 3.10 terlihat komponen PAD yang realisasinya menurun adalah dari Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Penjelasan capaian masing-masing komponen PAD adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

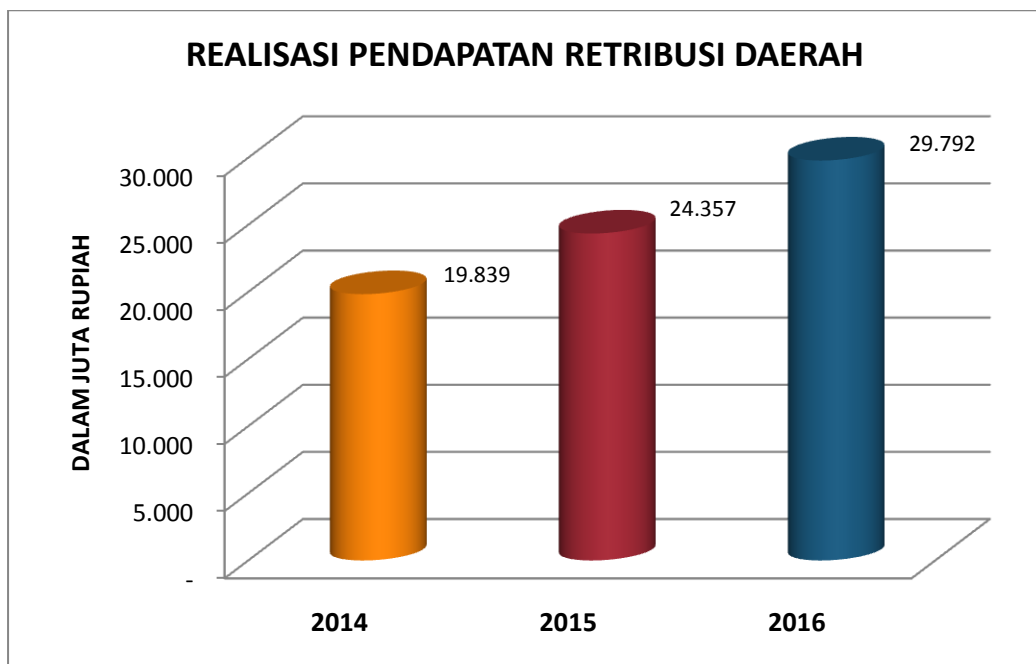
Dibandingkan dengan tahun 2015, penerimaan pajak daerah tahun 2016 mengalami penurunan pertumbuhan hingga 0,73%. Hal ini dikarenakan realisasi pada tahun 2016 lebih kecil dibanding tahun 2015. Realisasi Pajak Daerah yang mengalami penurunan adalah bagian PBBKB dan Pajak Rokok. Realisasi PBBKB pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 227.320.003.266,00 mengalami penurunan pertumbuhan hingga -16,88% ditahun 2016 dengan realisasi Rp. 188.945.861.622,00. Realisasi PBBKB tahun 2016 adalah sebesar 97,95% dari target tahun 2016. Tidak tercapainya target PBBKB tahun 2016 ini disebabkan kebijakan pemerintah pusat yang menurunkan harga bahan bakar minyak sebanyak 2 kali pada tahun 2016. Untuk Pajak Rokok tahun 2016 belum bisa mencapai target karena realisasi pajak rokok triwulan keempat dari kementerian keuangan belum ditransfer sebesar Rp. 44.786.003.561,00. Dibandingkan dengan tahun 2014, penerimaan pajak daerah tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 10,88% dengan angka pertumbuhan terbesar pada penerimaan pajak rokok yaitu 62,40%.

Adapun perkembangan Pajak Daerah dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



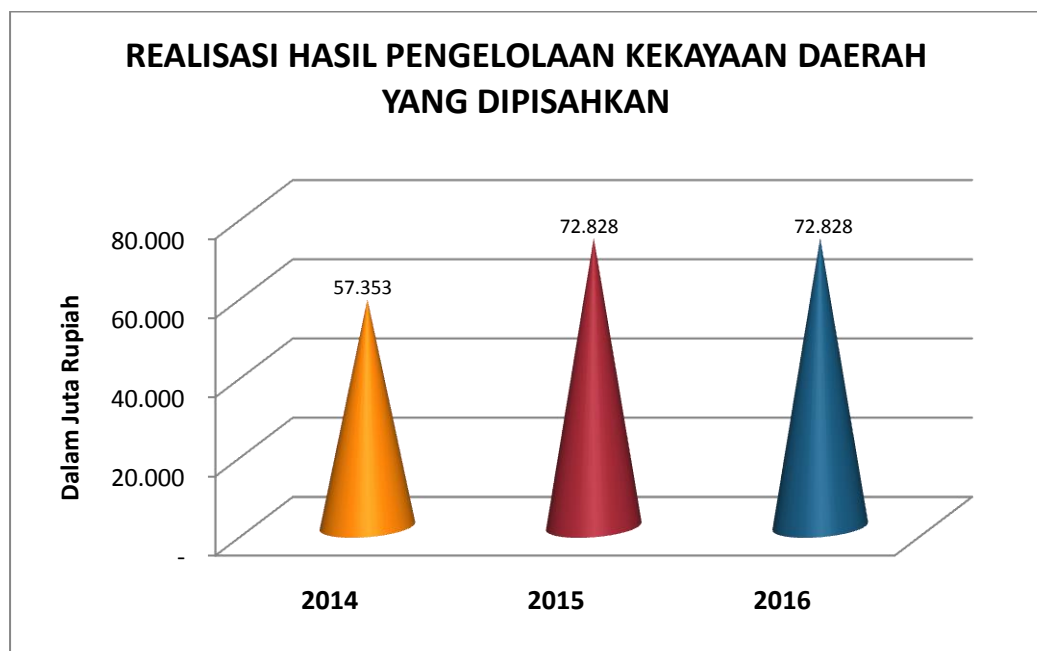
2. Retribusi Daerah.

Realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah tahun 2016 adalah sebesar 22,31 % dari penerimaan retribusi tahun 2015 dan sebesar 50,17% dari penerimaan retribusi daerah tahun 2014. Adapun Perkembangan retribusi daerah dapat dilihat pada grafik berikut ini:



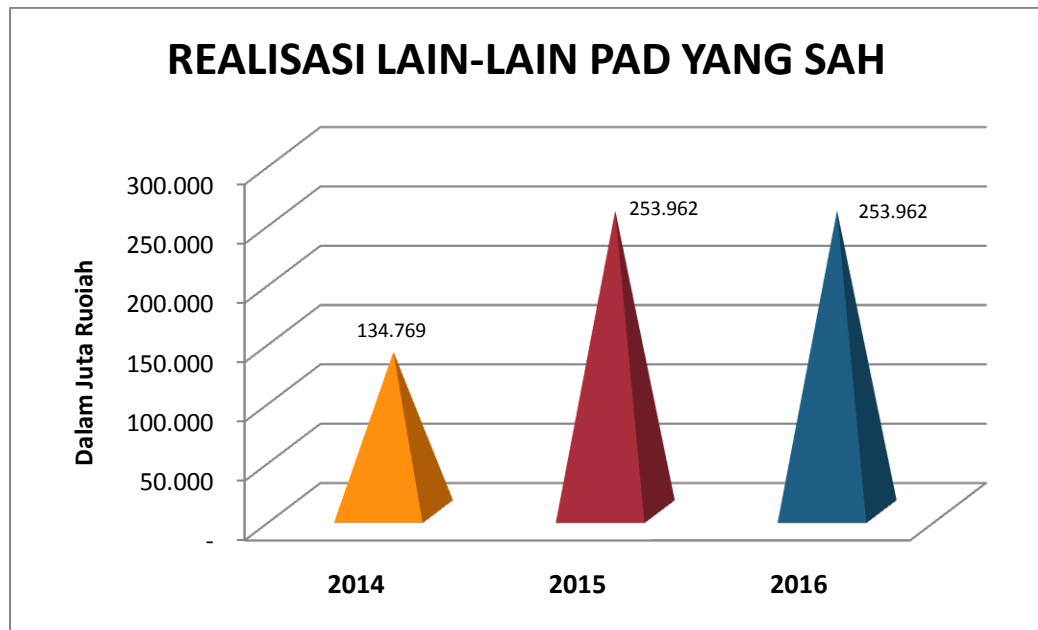
3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah.

Sama seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah juga mengalami peningkatan penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2016 pertumbuhan penerimaannya sebesar 15,18% (dari tahun 2015) dan 26,98% (dari tahun 2014) dengan capaian penerimaan tahun 2016 sebesar 46,10 persen dari target yang ditetapkan. Perkembangan hasil pengelolaan kekayaan daerah terlihat pada grafik sebagai berikut:



4. Lain-Lain PAD yang Sah.

Pada Tabel 3.10 terlihat capaian realisasi Lain-lain PAD yang sah tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -7,27 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2015. Namun jika dilihat dari capaian realisasi tahun 2016 terhadap target tahun 2016, Lain-lain PAD yang sah telah berhasil melampaui target sebesar 113,05 persen atau sebesar Rp. 253.962.171.867,97. Perkembangan lain-lain PAD yang sah dapat dilihat dalam grafik berikut:



Dari grafik diatas dapat dilihat penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2014 dan menurun pada tahun 2016.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD/Renstra tahun 2013-2018 (edisi Review), capaian realisasi PAD tahun 2016 telah mencapai 85,51 persen dari target akhir (tahun 2018) yang sebesar Rp. 1.590.322.845.658,00.

B. Dana Perimbangan

Penerimaan dana perimbangan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Penerimaan dana perimbangan tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 78,05% (dari penerimaan tahun 2015) dan 113,11% (dari penerimaan tahun 2014) serta sebesar 110,69% dari target dana perimbangan tahun 2016. Pertumbuhan pendapatan dana perimbangan meningkat tajam dikarenakan adanya penambahan bagian dari komponen DAK non fisik yang semula berada pada bagian lain-lain pendapatan daerah.

Jika dibandingkan dengan target akhir dalam RPJMD/Renstra tahun 2013-2018 maka penerimaan dana perimbangan telah mencapai 69,47%.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah

Lain-lain pendapatan daerah merupakan bagian pendapatan daerah yang terkecil. Penerimaan lain-lain pendapatan daerah tahun 2016 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -98,86 (dari penerimaan tahun 2015) dan sebesar -98,51% (dari penerimaan tahun 2014). Penerimaan dari komponen ini menurun dikarenakan sumber penerimaannya yaitu Dana Penyesuaian (BOS, Tunjangan Profesi Guru dll) telah dialihkan menjadi sumber penerimaan Dana Perimbangan pada bagian Dana Alokasi Khusus (non fisik).

Dibandingkan dengan target akhir dalam RPJMD/Renstra tahun 2013-2018 maka penerimaan lain-lain pendapatan lainnya telah mencapai 36,92% atau sama dengan capaian lain-lain pendapatan lainnya dari target 2016. Hal tersebut dikarenakan target akhir RPJMD/ Renstra sama dengan target tahun 2016.

3.2 BELANJA

3.2.1 CAPAIAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2016

Anggaran belanja Dipenda Provinsi NTB (kantor induk dan 9 UPTD) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni tahun 2016 sebesar Rp. 78.039.200.030,00 dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) bertambah Rp. 2.973.493.970,00 menjadi sebesar Rp. 81.012.694.000,00. Anggaran belanja tersebut berupa belanja tidak langsung sebesar Rp. 49.267.291.770,00 dan belanja langsung sebesar Rp.31.745.402.230,00. Anggaran dan realisasi belanja Dipenda Provinsi NTB dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.11

Anggaran dan Realisasi Belanja DIPENDA Provinsi NTB TA. 2016

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Keu	% fisik
A	Belanja Tdk Lgsg	49.267.291.770	40.846.560.612	82,91	98,00
B	Belanja Langsung	31.745.402.230	28.398.755.263	89,46	98,00
1.	Induk	11.958.799.225	9.846.192.719	82,33	92,01
2.	Mataram	2.825.535.630	2.471.769.002	87,48	98,92
3.	Gerung	2.586.565.725	2.502.107.045	96,73	100,00
4.	Praya	2.262.732.050	2.179.242.546	96,31	100,00
5.	Tanjung	1.683.677.100	1.567.193.956	93,08	99,83

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Keu	% fisik
6.	Selong	2.348.175.650	2.116.084.876	90,12	99,50
7.	Taliwang	2.024.106.810	1.930.728.746	95,39	100,00
8.	Sumbawa Besar	2.027.683.320	1.965.934.532	96,95	100,00
9.	Dompu	1.618.204.600	1.537.538.027	95,02	99,88
10.	Bima	2.409.922.120	2.281.963.814	94,69	99,42
Jumlah		81.012.694.000	69.245.315.875	85,47	97,41

Sumber Data : Laporan Realisasi Keuangan Dipenda Prov. NTB TA. 2016

Dari tabel diatas, capaian realisasi belanja langsung Dipenda Provinsi NTB tahun 2016 secara keseluruhan sebesar 89,46% dari target yang dianggarkan dengan realisasi terbesar pada UPTD PPDRD Sumbawa Besar yang mencapai 96,95% dan realisasi terendah pada kantor induk sebesar 82,33% sedangkan capaian realisasi belanja tidak langsung tahun 2016 sebesar 82,91% dari target yang dianggarkan. Adapun realisasi belanja secara fisik semua UPTD Dipenda NTB termasuk kantor induk lebih besar dari realisasi keuangannya, hal ini berarti Dipenda Provinsi NTB efisien dalam penggunaan anggarannya.

Sesuai DPPA Dipenda Provinsi NTB tahun 2016, terdapat 8 program pendukung pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung yang terurai sebagai berikut:

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Dipenda Provinsi NTB Per-Program Kegiatan

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. NTB		81.012.694.000,00	69.245.315.875,00	85,47	11.767.378.125,00
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	49.267.291.770,00	40.846.560.612,00	82,91	8.420.731.158,00
B.	BELANJA LANGSUNG	31.745.402.230,00	28.398.755.263,00	89,46	3.346.646.967,00
b.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.441.000.962,00	12.118.986.602,00	90,16	1.322.014.360,00
	Penyediaan jasa surat menyurat	87.437.400,00	83.581.725,00	95,59	3.855.675,00
	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	2.079.564.260,00	1.770.405.512,00	85,13	309.158.748,00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	584.986.000,00	549.901.000,00	94,00	34.085.000,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.854.557.500,00	1.851.264.110,00	99,82	3.293.390,00
	Penyediaan alat tulis kantor	551.260.000,00	548.342.225,00	99,47	2.917.775,00
	Penyediaan barang cetakan dan	1.495.370.000,00	1.038.583.100,00	69,45	476.786.900,00

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)
	penggandaan				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	77.853.900,00	77.248.600,00	99,22	605.300,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.435.360.000,00	4.031.537.560,00	90,90	403.822.440,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	66.424.000,00	62.505.500,00	94,10	3.918.500,00
	Penyediaan makanan dan minuman	326.850.000,00	286.090.830,00	87,53	40.759.170,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	540.789.002,00	517.158.090,00	95,63	23.630.912,00
	Penyediaan jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	387.900.000,00	386.500.000,00	99,64	1.400.000,00
	Penyediaan jasa keamanan kantor	952.648.900,00	915.868.350,00	99,80	36.780.550,00
b.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8.435.931.237,00	7.790.884.893,00	92,35	645.046.344,00
	Pembangunan gedung kantor	3.448.115.237,00	3.278.405.643,00	95,08	169.709.594,00
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	946.200.000,00	885.820.250,00	93,62	60.379.750,00
	Pengadaan meubelair	1.147.795.700,00	977.904.000,00	85,20	169.891.700,00
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1.230.122.200,00	1.170.381.400,00	95,14	59.740.800,00
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	1.091.698.100,00	949.354.457,00	86,96	142.343.643,00
	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	221.400.000,00	196.180.992,00	88,61	25.219.008,00
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor	350.600.000,00	332.838.151,00	94,93	17.761.849,00
b.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	206.085.000,00	151.372.900,00	73,45	54.712.100,00
	Pendidikan dan pelatihan formal	141.785.000,00	101.122.900,00	71,32	40.662.100,00
	Pembinaan mental dan fisik aparatur	64.300.000,00	50.250.000,00	78,15	14.050.000,00
b.4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	261.417.000,00	240.334.780,00	91,94	21.082.220,00
	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	94.850.000,00	91.000.000,00	63,14	3.850.000,00
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	70.150.000,00	67.886.780,00	97,06	2.263.220,00
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	96.417.000,00	81.448.000,00	84,47	14.969.000,00
b.5	Program peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	362.940.000,00	306.279.500,00	84,39	56.660.500,00
	Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah	362.940.000,00	306.279.500,00	84,39	56.660.500,00

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)
b.6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	8.733.768.031,00	7.494.093.561,00	85,81	1.239.674.470,00
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	341.659.500,00	240.765.700,00	70,47	100.893.800,00
	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	4.906.840.351,00	4.040.201.929,00	82,34	866.638.422,00
	Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan	771.910.000,00	696.309.192,00	90,21	75.600.000,00
	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	1.780.640.000,00	1.691.775.000,00	95,01	88.865.000,00
	Konsultasi; Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	311.617.380,00	303.313.100,00	97,34	8.304.280,00
	Rapat Koordinasi Dinas Pendapatan Provinsi NTB dengan Instansi terkait	235.977.700,00	191.876.840,00	81,31	44.100.860,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL	52.320.000,00	44.978.000,00	85,97	7.342.000,00
	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	75.100.000,00	49.292.100,00	65,64	25.807.900,00
	Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	182.483.100,00	163.516.700,00	89,61	18.966.400,00
	Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PLL	50.110.000,00	48.815.000,00	97,42	1.295.000,00
	Aplikasi Retribusi dan PPL	25.110.000,00	23.250.000,00	92,59	1.860.000,00
b.7	Program Reformasi Birokrasi	253.860.000,00	253.823.027,00	99,99	36.973,00
	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	253.860.000,00	253.823.027,00	99,99	36.973,00
b.8	Program Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Asset	50.400.000,00	42.980.000,00	85,28	7.420.000,00
	Peningkatan Management Asset/barang Daerah	50.400.000,00	42.980.000,00	85,28	7.420.000,00

Sumber Data : Laporan Realisasi Keuangan Dipenda Provinsi NTB TA 2016

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) atau yang dahulu dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dipenda Provinsi NTB Tahun 2016, Nilai capaian/pengukuran kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal yaitu jika capaian anggaran keuangan sebesar 85 s.d 100 maka dinyatakan *Sangat Berhasil*, jika capaiannya

sebesar $70 \leq s.d < 85$ dinyatakan *Berhasil*, jika $55 \leq s.d < 70$ dinyatakan *Cukup Berhasil* dan jika capaian kinerjanya < 55 maka dinyatakan *Tidak berhasil*.

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 dari 8 (delapan) Program yang dilaksanakan diatas, 6 (enam) Program dinyatakan *Sangat Berhasil*, 2 (dua) Program dinyatakan *Berhasil* dan tidak ada Program dinyatakan *Cukup Berhasil* ataupun Program yang dinyatakan *tidak berhasil*, Sehingga hasil rata-rata dari pengukuran kinerja kegiatan selama tahun 2016 adalah:

$703,37 \% : 8 = 87,92\%$ (Sangat Berhasil).

Dari perhitungan tersebut dapat dikatakan capaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2016 dalam katagori *sangat berhasil*.

Dalam RPJMD/Renstra telah ditetapkan 1 program prioritas Dipenda Provinsi NTB yaitu program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan 11 kegiatan utama pada tahun anggaran 2016. Anggaran dan hasil kegiatan program prioritas tersebut pada kantor induk dan 9 UPTD Dipenda Provinsi NTB selama tahun 2016 akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Kantor Induk Dipenda Provinsi NTB

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 341.659.500,- dan terealisasi Rp. 240.765.700,- dengan kegiatan utama berupa sosialisasi Perda Jasa Usaha (Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha) yang dihadiri 79 peserta dari SKPD/UPTD terkait dan sosialisasi Perda Jasa Umum (Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum) yang dihadiri 88 peserta dari SKPD/UPTD terkait dan masyarakat umum. Kegiatan lainnya adalah berupa konsultasi/koordinasi ke kementrian mengenai Perda Jasa Umum dan Jasa Usaha tersebut serta penggandaan Perda Jasa Umum dan Jasa Usaha tersebut sebanyak 200 eksemplar. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dibawah koordinasi bidang retribusi

dan pendapatan lainnya dengan kepala bidang selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)

b. Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.071.261.701,- dan terealisasi Rp. 2.342.136.563,- atau 76,26 persen dengan realisasi fisik sebesar 80%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah. Rincian kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah pelayanan samsat weekend dan samsat corner LEM, Rapat Pembina Samsat yang dihadiri Perwakilan instansi pembina samsat yaitu Jasa Raharja cabang NTB, Polda NTB dan Dipenda Provinsi NTB serta Rapat Harian Samsat yang dihadiri pejabat struktural internal Dipenda Provinsi NTB. Kegiatan lainnya berupa penyusunan buku dan sosialisasi NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) sesuai Pergub No. 31 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB (pembinaan dan penerapan Perda NJKB ini disajikan dalam 2 laporan), Penyusunan Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Fasilitasi dan Kemudahan Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, penyusunan Pergub No. 36 Tahun 2016 (tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah), penyusunan laporan sengketa pajak selama tahun 2016, koordinasi dan verifikasi data PBBKB ke depot Pertamina Badas dan Bima serta evaluasi pengawasan dan penerimaan pajak air permukaan PDAM dan Non PDAM se-NTB yang dilaporkan dalam 16 laporan.

Dalam kegiatan intensifikasi penerimaan pajak daerah tahun 2016, dilakukan pula sosialisasi pajak daerah yaitu acara gebyar pajak dengan melibatkan wajib pajak secara langsung. Kegiatan inovatif ini berupa gerak jalan bersama, senam zumba, pemberian *reward* kepada wajib pajak dan pengundian kupon *door price* diiringi hiburan berupa suguhan

band local yang dilaksanakan di Lombok Timur pada akhir triwulan keempat tahun 2016. Secara fisik, kegiatan ini telah dilaksanakan sebesar 80%.

c. Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 198.100.000,- dan terealisasi 75% yaitu Rp. 149.490.298,- dengan realisasi fisik sebesar 85%. Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain berupa pengendalian server dan jaringan yang mendukung kegiatan pelayanan Dipenda Provinsi NTB, rapat teknis dengan kepolisian dan jasa raharja, serta belanja aplikasi kesamsatan.

d. Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan

Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 303.313.100,- atau 97,34% dari anggaran sebesar Rp. 311.617.380,- dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rincian kegiatan ini berupa rapat rekonsiliasi data pajak dan dana perimbangan dengan instansi terkait dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 22 orang, koordinasi data wajib pajak PPh pasal 21,25/29, pemantauan PBB P2 ke kab/kota se-NTB, koordinasi dan konsultasi konsentrat di PT. Newmont Nusa Tenggara, serta koordinasi dan konsultasi *royalty* dan *landrent* dalam 8 laporan.

e. Rapat Koordinasi Dinas Pendapatan Provinsi NTB dengan Instansi terkait.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 235.977.700,- dan terealisasi Rp.191.876.840,- atau 81,31% dengan realisasi fisik 95%. Kegiatan ini berupa rapat koordinasi perubahan target pendapatan tahun 2016 dan rencana target tahun 2017 dengan 100 orang peserta rapat dari 27 SKPD/UPTD dan 9 UPTD PPDRD, konsultasi pendapatan daerah provinsi NTB dan pemantapan program serta evaluasi RAPBD Murni dan perubahan ke kementrian dan provinsi lainnya.

f. Koordinasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lainnya

Indicator kinerja kegiatan ini tersusunnya data hasil sinkronisasi penerimaan retribusi dan pendapatan lainnya. Dengan anggaran Rp. 52.320.000,- bidang retribusi dan pendapatan lainnya telah merealisasikan sebesar Rp. 44.978.000,- atau 85,97% dengan melakukan sinkronisasi data penerimaan retribusi dan pendapatan lainnya baik di SKPD/UPTD Provinsi NTB di Pulau Lombok dan Sumbawa maupun Kantor Penghubung Pemprov di Jakarta yang disajikan dalam 7 laporan. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dibawah koordinasi bidang retribusi dan pendapatan lainnya dengan kepala bidang selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)

g. Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan Pendapatan Lainnya.

Dalam melakukan pemungutan retribusi dan pendapatan lainnya, perlu dilakukan verifikasi administrasi terhadap SKPD/UPTD yang memungut langsung retribusi dan pendapatan lainnya. Kegiatan verifikasi ini dianggarkan sebesar Rp.75.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 49.292.100 atau 65,64%. Hasil verifikasi disajikan dalam 10 laporan. Kegiatan ini juga dibawah koordinasi bidang retribusi dan pendapatan lainnya dengan kepala bidang selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)

h. Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya

Kegiatan intensifikasi objek retribusi dan pendapatan lainnya ini juga merupakan salah satu kegiatan dibawah koordinasi koordinasi bidang retribusi dan pendapatan lainnya. Dengan anggaran sebesar Rp. 182.483.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 163.516.700, Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan berupa rapat evaluasi penerimaan semester dengan 170 peserta rapat dari SKPD/UPTD Pemprov NTB serta intensifikasi objek retribusi dan Pendapatan lainnya ke SKPD/UPTD Pemprov NTB yang merupakan pemungut langsung.

i. Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lainnya

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 50.110.000,- dan terealisasi sebesar 97,42% atau Rp. 48.815.000,- secara fisik, kegiatan ini telah dilaksanakan 100%. Artinya ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.295.000,-. Bentuk kegiatan ini berupa pengawasan tunggakan penerimaan retribusi dan PLL pada SKPD/UPTD dibawah koordinasi bidang retribusi dan pendapatan lainnya.

j. Aplikasi Retribusi dan Pendapatan Lainnya

Dengan anggaran Rp. 25.110.000,- telah terealisasi Rp. 23.250.000,- atau 92,59% dengan realisasi fisik telah mencapai 100%. Kegiatan yang dilakukan berupa monitoring aplikasi Retribusi Online yang telah dipasang di beberapa SKPD/UPTD pemungut langsung Retribusi dan Pendapatan Lainnya.

2. UPTD PPDRD Mataram.

Program prioritas pada setiap UPTD Dipenda Provinsi NTB hanya memiliki 3 kegiatan yaitu intensifikasi penerimaan pajak daerah, orientasi dan peningkatan teknis kesamsatan dan operasi penertiban kendaraan bermotor. Anggaran program prioritas UPTD PPDRD Mataram tahun 2016 adalah sebesar Rp.463.128.850,- dan terealisasi Rp. 392.951.500,- (84,85%). Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya berupa 100 kali operasi gabungan di 14 Lokasi dengan hasil 2.545 ranmor (kendaraan bermotor) terjaring dan 1.818 unit yang melakukan daftar ulang. Anggaran pelaksanaan kegiatan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor tersebut adalah sebesar Rp. 224.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.199.160.000,- (88,83%),. Anggaran samling (2 mobil) dan drive thru (4 lokasi) sebesar Rp.118.440.000,- yang terealisasi Rp. 109.894.665,-. Penerimaan pajak alat berat dari target 8 perusahaan dan Dinas PU (48 Unit) terealisasi 38 Unit dengan nilai PKB sebesar Rp. 46.512.236,-. Sosialisasi Pajak daerah selama tahun 2016 dilakukan melalui 12 spanduk. Untuk kegiatan orientasi

peningkatan tekhis kesamsatan, UPTD PPDRD Mataram telah mengirimkan 10 orang sebagai peserta pemantapan program/peningkatan wawasan kesamsatan. Secara fisik pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program prioritas pada UPTD PPDRD Mataram sudah mencapai 97,67 persen.

3. UPTD PPDRD Gerung

Anggaran program prioritas pada UPTB PPDRD Gerung adalah sebesar Rp. 458.078.850,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 447.826.150,00 (97,76%). Gerung memiliki 4 samsat pembantu lainnya selain yang berada pada lokasi UPTD PPDRD gerung. Kegiatan intensifikasi penerimaan pajak daerah yang telah dilakukan berupa pelayanan samsat keliling, drive thru, agent samsat, penyampaian surat teguran dan sosialisasi pajak daerah melalui 25 buah spanduk dan 1.500 stiker. Kegiatan orientasi peningkatan tekhis kesamsatan, UPTD PPDRD Gerung telah mengirimkan 5 orang sebagai peserta pemantapan program/peningkatan wawasan kesamsatan. Untuk kegiatan operasi penertiban kendaraan bermotor selama tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp.226.760.000,- dan terealisasi Rp.219.400.000,- (96,75), telah dilaksanakan 84 kali opgab yang berhasil menjaring 2.388 ranmor TMDU dan dari ranmor TMDU tersebut, 1.728 ranmor telah terbayarkan. Secara fisik kegiatan-kegiatan program prioritas di UPTD PPDRD Gerung telah mencapai 100%.

4. UPTD PPDRD Praya

Anggaran program prioritas pada UPTB PPDRD Praya adalah sebesar Rp. 441.748.850,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 433.693.700,- (97,76%). Praya memiliki 3 samsat pembantu lainnya berupa 1 buah mobil samling dan drive thru yang berlokasi di Kopang dan Praya. Kegiatan intensifikasi penerimaan pajak daerah (dengan anggaran sebesar Rp. 177.168.850,-) telah dilakukan berupa pelayanan samsat keliling, drive thru, agent samsat, penyampaian surat teguran dan sosialisasi pajak daerah melalui 58 buah spanduk dan 2.000 lembar brosur sosialisasi. Kegiatan

orientasi peningkatan tekhis kesamsatan, UPTD PPDRD Praya telah mengirimkan 5 orang sebagai peserta pemantapan program/peningkatan wawasan kesamsatan. Anggaran operasi penertiban kendaraan bermotor selama tahun 2016 telah terealisasi sebesar Rp. 199.340.000,- dari target sebesar Rp.202.080.000,- , kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 86 kali. Secara fisik kegiatan-kegiatan program prioritas di UPTD PPDRD Praya telah mencapai 100%.

5. UPTD PPDRD Tanjung

Anggaran program prioritas pada UPTB PPDRD Tanjung adalah sebesar Rp. 350.568.850,- dan sudah terealisasi sebesar Rp.326.124.800,- (93,03%). Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya berupa operasi gabungan sebanyak 72 kali dan telah berhasil menjaring 1.206 kendaraan dengan 797 kendaraan dapat terbayarkan. Anggaran pelaksanaan kegiatan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor tersebut adalah sebesar Rp.176.920.000 ,- dengan realisasi sebesar Rp.166.550.000,- (94,14%). Untuk kegiatan intensifikasi penerimaan pajak daerah, Anggaran samling, agent samsat, drive thru dan penyampaian surat teguran sebesar Rp.120.148.850,- yang terealisasi Rp. 106.589.200,-. Sosialisasi Pajak daerah selama tahun 2016 dilakukan melalui 5 buah spanduk, 6 baliho dilokasi strategis, 8 buah banner dan 6 buah mika. Kegiatan orientasi peningkatan tekhis kesamsatan, UPTD PPDRD Tanjung telah mengirimkan 6 orang sebagai peserta pemantapan program/peningkatan wawasan kesamsatan Secara fisik pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program prioritas pada UPTD PPDRD Tanjung sudah mencapai 99,33 persen.

6. UPTD PPDRD Selong.

Anggaran program prioritas pada UPTB PPDRD Selong adalah sebesar Rp. 482.558.850,- dan sudah terealisasi sebesar Rp.422.473.300,- (87,55%). Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya berupa operasi gabungan sebanyak 96 kali dengan anggaran pelaksanaan kegiatan

Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor tersebut adalah sebesar Rp.222.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.208.020.000,- (93,70%). Anggaran samling, drive thru dan kegiatan intensifikasi penerimaan pajak lainnya adalah sebesar Rp.196.348.850,- yang terealisasi Rp. 153.482.000,-. Sosialisasi Pajak daerah selama tahun 2016 dilakukan melalui 39 buah spanduk dan 5 baliho dilokasi strategis. Kegiatan orientasi peningkatan tekhis kesamsatan, UPTD PPDRD Selong telah mengirimkan 10 orang sebagai peserta pemantapan program/peningkatan wawasan kesamsatan. Secara fisik pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program prioritas pada UPTD PPDRD Tanjung sudah mencapai 98,17 persen.

7. UPTD PPDRD Taliwang

Anggaran program prioritas pada UPTB PPDRD Taliwang adalah sebesar Rp.445.268.850,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 431.704.850,- (96,95%). Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya berupa operasi gabungan sebanyak 77 kali dan telah berhasil menjaring 829 kendaraan dengan 624 kendaraan dapat terbayarkan. Anggaran pelaksanaan kegiatan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor tersebut adalah sebesar Rp.174.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp.170.550.000,- (97,93%). kegiatan intensifikasi penerimaan pajak daerah yang berupa pelayanan samling, drive thru, agent samsat, penyampaian surat teguran, sosialisasi dan kegiatan lainnya telah menggunakan anggaran sebesar Rp.207.373.850 dari target Rp. 213.318.850,-. Sedangkan dari target 8 perusahaan yang memiliki potensi PKB alat berat, telah berhasil terdata dan tertagih 541 unit kendaraan alat berat. Sosialisasi Pajak daerah selama tahun 2016 dilakukan melalui 10 buah baliho dilokasi strategis dan 4 kali sosialisasi melalui siaran radio (kampung media). Untuk Kegiatan orientasi peningkatan tekhis kesamsatan, UPTD PPDRD Taliwang telah mengirimkan 9 orang sebagai peserta pemantapan program/peningkatan wawasan kesamsatan. Secara fisik pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program prioritas pada UPTD PPDRD Taliwang sudah mencapai 100%.

8. UPTD PPDRD Sumbawa Besar

Anggaran program prioritas pada UPTB PPDRD Sumbawa Besar adalah sebesar Rp. 555.098.850,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 551.273.369,- (99,31%). UPTD PPDRD Sumbawa Besar memiliki 4 samsat pembantu lainnya berupa 1 buah mobil samling dan 3 drive thru/gerai yang berlokasi di Sliper Ate, Alas dan Pelampang. Kegiatan intensifikasi penerimaan pajak daerah (dengan anggaran sebesar Rp. 272.548.850,-) telah dilakukan berupa pelayanan samsat keliling, drive thru, agent samsat, penyampaian surat teguran dan sosialisasi pajak daerah melalui 5 buah spanduk, 3.000 lembar brosur sosialisasi dan media cetak sebanyak 3 kali. Kegiatan orientasi peningkatan tekhis kesamsatan, UPTD PPDRD Sumbawa Besar telah mengirimkan 12 orang sebagai peserta pemantapan program/peningkatan wawasan kesamsatan. Anggaran operasi penertiban kendaraan bermotor selama tahun 2016 telah terealisasi sebesar Rp. 211.290.000,- dari target sebesar Rp.211.960.000,- , kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 88 kali. Secara fisik kegiatan-kegiatan program prioritas di UPTD PPDRD Sumbawa Besar telah mencapai 100%.

9. UPTD PPDRD Dompu.

Anggaran program prioritas pada UPTB PPDRD Dompu adalah sebesar Rp. 439.458.850,- dan sudah terealisasi sebesar Rp.415.385.491,- (94,52%). Kegiatan intensifikasi penerimaan pajak daerah (dengan anggaran sebesar Rp. 229,748.850,-) telah dilakukan berupa pelayanan samsat keliling, drive thru, agent samsat, penyampaian surat teguran dan sosialisasi pajak daerah melalui 24 buah spanduk dan media cetak sebanyak 2 kali. Kegiatan orientasi peningkatan tekhis kesamsatan, UPTD PPDRD Dompu telah mengirimkan 8 orang sebagai peserta pemantapan program/peningkatan wawasan kesamsatan. Anggaran operasi penertiban kendaraan bermotor selama tahun 2016 telah terealisasi sebesar Rp. 211.290.000,- dari target sebesar Rp.211.960.000,- , kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 72 kali. Secara fisik kegiatan-kegiatan program prioritas di UPTD PPDRD Sumbawa Besar telah mencapai 99,50%.

10. UPTD PPDRD Bima

Anggaran program prioritas pada UPTB PPDRD Bima adalah sebesar Rp.554,117,850,- dan sudah terealisasi sebesar Rp.515.226.100,- (92,98%). Anggaran pada UPTD PPDRD Bima ini digunakan pada 2 lokasi UPTD yaitu di Raba dan Panda Bima. Sama seperti UPTB PPDRD yang lain, program prioritas di unit Bappenda ini hanya memiliki 3 kegiatan yaitu intensifikasi penerimaan pajak daerah, orientasi peningkatan tekhnis kesamsatan dan operasi penertiban kendaraan bermotor. Anggaran Kegiatan intensifikasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 278.817.850 telah terealisasi Rp. 273.310.700 atau 98,02%. Kegiatannya berupa pelayanan samsat keliling, drive thru, agent samsat, penyampaian surat teguran dan sosialisasi pajak daerah melalui 40 buah spanduk dan media cetak (iklan koran) selama 3 bulan serta 500 stiker pajak. Operasi penertiban kendaraan bermotor selama tahun 2016 telah dilakukan sebanyak 90 kali dengan rincian hasil opgab yaitu 976 Kendaraan terjaring dan 643 yang melakukan daftar ulang pada Kab Bima, Sedangkan pada Kota Bima ada 973 kendaraan yang terjaring dan 641 yang melakukan daftar ulang. Anggaran kegiatan opgab ini adalah sebesar Rp. 193.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 174.915.000,-. Kegiatan orientasi peningkatan tekhis kesamsatan, UPTD PPDRD Bima telah mengirimkan 9 orang sebagai peserta pemantapan program/peningkatan wawasan kesamsatan.

3.2.2 CAPAIAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2016 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Anggaran belanja tahun 2016 meningkat dari tahun 2015, perkembangan anggaran dan realisasi belanja disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Belanja Dipenda Provinsi NTB
Tahun 2015 dan 2016 per-Program

No	Uraian	2015				2016			
		Anggaran	Realisasi	% keu	% fsk	Anggaran	Realisasi	% keu	% fsk
Belanja Dipenda		76.030.557.966	70.758.622.338	93,07	93,07	81.012.694.000	69.245.315.875	85,47	97,41
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	52.387.358.506	49.274.465.203	94,06	94,06	49.267.291.770	40.846.560.612	82,91	98,00
B	BELANJA LANGSUNG	23.643.199.460	21.484.157.135	90,87	90,87	31.745.402.230	28.398.755.263	89,46	98,00
	a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.787.920.500	8.673.053.427	88,61	88,61	13.441.000.962	12.118.986.602	90,16	99,93
	b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6.195.239.920	5.803.338.362	93,67	93,67	8.435.931.237	7.790.884.893	92,35	99,81
	c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	252.344.000	194.477.300	77,07	77,07	206.085.000	151.372.900	73,45	92,25
	d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	220.769.000	188.008.000	85,16	85,16	261.417.000	240.334.780	91,94	98,67
	e. Program peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	165.248.000	147.317.000	89,15	89,15	362.940.000	306.279.500	84,39	96,42
	f. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.760.618.040	6.232.582.507	92,19	92,19	8.733.768.031	7.494.093.561	85,81	92,51
	g. Program Reformasi Birokrasi	203.860.000	200.450.539	98,33	98,33	253.860.000	253.823.027	99,99	100,00
	h. Program Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Aset	57.200.000	44.930.000	78,55	78,55	50.400.000	42.980.000	85,28	95,00

Sumber Data : Laporan Anggaran Belanja Dipenda NTB Bulan Desember 2016

Anggaran belanja tahun 2016 sebesar Rp. 81.012.694.000,- meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp. 4.982.136.034,- atau 6,55 persen dari anggaran belanja tahun 2015 yang sebesar Rp.76.030.557.966,-. Capaian realisasi belanja tahun 2016 sebesar 85,47% lebih kecil dibandingkan dengan capaian realisasi belanja tahun 2015 yang sebesar 93,07%. Realisasi belanja tahun 2016 mengalami penurunan 2,13% dari tahun 2015 dengan realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp. 69.245.315.875 dan realisasi belanja tahun 2015 sebesar Rp. 70.758.622.338. Hal ini disebabkan realisasi belanja tahun 2016 pada bagian belanja tidak langsung mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi

tahun 2015 hingga Rp. 8.427.904.591,- dan dalam bagian belanja langsung tahun 2016, program yang mengalami penurunan realisasi belanja (dibandingkan dengan tahun 2015) adalah program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Aset. Jika dilihat dari kondisi fisik anggaran belanja, persentase capaian fisik tahun 2016 lebih besar dari persentase capaian keuangan tahun 2016 yang berarti pada tahun 2016 Dipenda Provinsi NTB lebih efisien dalam penggunaan anggarannya dibandingkan dengan tahun 2015.

Anggaran belanja Dipenda Provinsi NTB tahun 2016 dibagi dalam 10 DPA, dimana kuasa pengguna anggaran untuk UPTD Dipenda dipegang oleh masing-masing kepala UPTD. Realisasi belanja masing-masing UPTB dari tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Dipenda Provinsi NTB
Tahun 2015 dan Tahun 2016 Per-UPTD

NO.	Uraian		2015				2016			
			Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Keu	% Fsk	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Keu	% Fsk
A	Belanja Tidak Langsung		52.387.358.506	49.274.465.203	94,06	94,06	49.267.291.770	40.846.560.612	82,91	98,00
B	Belanja Langsung		23.643.199.460	21.484.157.135	90,87	90,87	31.745.402.230	28.398.755.263	89,46	98,00
	1.	Kantor INDUK	9.650.739.373	8.394.326.575	86,98	86,98	11.958.799.225	9.846.192.719	82,33	92,10
	2.	UPTD PPDRD Mataram	1.646.395.562	1.443.183.882	87,66	87,66	2.825.535.630	2.471.769.002	87,48	98,92
	3.	UPTD PPDRD Praya	1.635.898.550	1.544.902.008	94,44	94,44	2.262.732.050	2.179.242.546	96,31	100,00
	4.	UPTD PPDRD Selong	1.717.491.000	1.581.738.151	92,10	92,10	2.348.175.650	2.116.084.876	90,12	99,50
	5.	UPTD PPDRD Sumbawa besar	1.681.173.570	1.611.414.369	95,85	95,85	2.027.683.320	1.965.934.532	96,95	100,00
	6.	UPTD PPDRD Bima	1.705.674.870	1.572.168.140	92,17	92,17	2.409.922.120	2.281.963.814	94,69	99,42
	7.	UPTD PPDRD Gerung	1.915.907.875	1.851.664.700	96,65	96,65	2.586.565.725	2.502.107.045	96,73	100,00
	8.	UPTD PPDRD Taliwang	1.230.609.660	1.162.437.446	94,46	94,46	2.024.106.810	1.930.728.746	95,39	100,00
	9.	UPTD PPDRD Tanjung	1.205.762.250	1.148.591.569	95,26	95,26	1.683.677.100	1.567.193.956	93,08	99,83
	10.	UPTD PPDRD Dompu	1.253.546.750	1.190.312.295	94,96	94,96	1.618.204.600	1.537.538.027	95,02	99,88
TOTAL			76.030.557.966	70.758.622.338	93,07	93,07	81.012.694.000	69.245.315.875	85,47	97,41

Sumber Data : Laporan Anggaran Belanja Dipenda NTB Bulan Desember 2016

Anggaran belanja setiap UPTD Dipenda Provinsi NTB tahun 2016 meningkat dari tahun 2015 kecuali dari bagian belanja tidak langsung tahun 2016 yang berkurang hingga Rp.3.120.066.736 dari anggaran tahun 2015. Begitupun dengan realisasi penggunaan anggaran belanja 9 UPTD dan kantor induk tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015 dengan realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp. 28.398.755.263,- dan realisasi belanja tahun 2015 Rp. 21.484.157.135,-.

Pada tahun 2015, dari 9 UPTD Dipenda, UPTD PPDRD Gerung memiliki anggaran dan realisasi belanja terbesar dikarenakan adanya pembangunan gedung kantor yaitu pembangunan Drive Thru gunung Sari. Sedangkan pada tahun 2016, UPTD PPDRD Mataram memiliki anggaran terbesar karena adanya pembangunan gedung kantor berupa pembuatan ruang arsip notice serta penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Dari persentase fisik setiap UPTD dan kantor induk Dipenda, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 Dipenda Provinsi NTB lebih efisien dalam menggunakan anggaran belanjanya dibandingkan dengan tahun 2015.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

4.1 PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang mengkoordinir dan menghimpun pendapatan adalah selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak
2. Data potensi pajak dan retribusi daerah yang belum akurat.
3. Kendaraan bermotor yang berpindah kepemilikan dan alamat menyebabkan kendala dalam penagihan pajak kendaraan bermotor.
4. Persyaratan pembayaran PKB yang mengharuskan membawa KTP asli pemilik kendaraan.
5. Sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah yang kurang memadai.
6. Kebijakan pemerintah pusat yang berubah sesuai dengan keadaan perekonomian negara.
7. Kurangnya SDM pegawai Dipenda Provinsi NTB.

4.2 UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi diatas, upaya-upaya yang ditempuh DIPENDA Provinsi NTB antara lain:

1. Melakukan sosialisasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan.
2. Melakukan kerjasama dengan pemerintah kab/kota untuk mengurangi angka kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang.

3. Melakukan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah.
4. Mengembangkan pelayanan kesamsatan dengan samsat nonstop service 24/7 yang siap melayani wajib pajak setiap hari.
5. Melakukan koordinasi dengan mitra samsat yaitu Kepolisian dan Jasa Raharja.
6. Melakukan koordinasi dengan SKPD/UPTD penerima dan pengelola pendapatan daerah.
7. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
8. Pengembangan SDM dalam meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur.

Disamping upaya-upaya pemecahan masalah tersebut, ada berbagai inovasi yang dilakukan DIPENDA Provinsi NTB selama tahun 2016 dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah khususnya PKB dan BBNKB yaitu:

1. Menambah unit dan jam pelayanan ditempat strategis yaitu di samsat *corner* Lombok Epicentrum Mall dan samsat *weekend* di Jalan Majapahit (Kantor Induk) yang melayani Wajib Pajak hingga malam hari.
2. Menambah layanan drive thru di Paoq Motong Lombok Timur dan Gunung Sari Lombok Barat.
3. Mengadakan gebyar pajak di Selong Lombok Timur guna mensosialisasikan Pajak Daerah kepada Masyarakat.
4. Memberikan reward kepada Wajib Pajak yang taat membayar.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 323 personil telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga pada tahun 2016 pendapatan daerah dapat terealisasi sebesar Rp.3.949.896.952.277,97 yakni 103,86% dari target pendapatan daerah sebesar Rp.3.802.933.445.799,00.
2. Terhadap anggaran pendapatan daerah yang tertung dalam DPA Dipenda Provinsi NTB tahun anggaran 2016, dari target pendapatan asli daerah sebesar Rp.1.056.098.159.000,- yang bersumber dari Pajak Daerah dan Denda Pajak, telah terealisasi sebesar Rp.1.022.895.014.151,- atau 96,86%.
3. Penerimaan Pajak daerah tahun 2016 dari bagian PKB dan BBNKB yang dikelola langsung oleh Dipenda Provinsi NTB melalui 9 UPTD telah berhasil melampaui target yang sebesar Rp.566.656.155.000,- dengan realisasi sebesar Rp.591.396.861.332,- (104,37%)
4. Dari Anggaran belanja Dipenda Provinsi NTB tahun 2016 sebesar Rp.81.012.694.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.69.245.315.875,- (85,47%) dengan rincian realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.40.846.560.612,- dan belanja langsung sebesar Rp.28.398.755.263,-.
5. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dipenda Provinsi NTB telah melakukan berbagai upaya dan inovasi guna meningkatkan pendapatan daerah.

5.2. Saran

1. Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan melakukan berbagai inovasi dan perbaikan-perbaikan pada bidang pelayanan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan menekan biaya ekonomi wajib pajak.
2. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat agar terdorong dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Daerah dalam rangka ikut berpartisipasi mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD/UPTD penerima dan pengelola pendapatan daerah.
4. Pengoptimalan sistem online kesamsatan guna meningkatkan penerimaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah.
5. Peningkatan dan pengembangan SDM aparatur dapat dilakukan melalui berbagai pendidikan formal, bintek, pelatihan dan seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja.

Akhir kata, semoga laporan tahunan Dinas Pendapatan Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat menjadi bahan evaluasi dan informasi dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.